Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)
e-ISSN:2684-8082 Vol. 7 No. 1, Januari 2025 (115-133) doi: 10.24198/padjir.v7i1.58525

Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Eksistensi BRICS Pada Masa Pemerintahan SBY (2009 – 2013) dan Jokowi (2014 – 2023)

Marshadea Aisyah
Universitas Padjadjaran, Indonesia; marshadea21001@mail.unpad.ac.id
Siti Aliyuna Pratisti
Universitas Padjadjaran, Indonesia; aliyuna@unpad.ac.id

| Dikirim: 03-11-2024 | Direvisi: 27-01-2025 | Diterima: 27-01-2025 | Dipublikasikan: 01-02-2025 |

Keywords
Indonesian Foreign Policy, BRICS, Foreign Policy Decision Making Perspective

ABSTRACT
BRICS is an international organization established to promote economic cooperation and foster more equitable global governance for developing countries. To strengthen its influence, BRICS seeks to expand its membership to other developing nations, including Indonesia, which possesses significant economic potential and international influence. This research aims to understand Indonesia's foreign policy toward the existence of BRICS through its interactions with the organization. The research employs qualitative method, guided by the concept of foreign policy, particularly Lovell's strategic perspective. Findings of this research indicate that Indonesia has maintained good relations with BRICS, both during the administration of Susilo Bambang Yudhoyono (2009–2013) and Joko Widodo (2014–2023). Despite the fact that discussions regarding Indonesia's potential membership in BRICS have been ongoing since the organization's formation in 2009, however, as of 2023, Indonesia has yet to join BRICS as a member. This point suggests interesting relations between the two political entities, and also reflects how Indonesia's foreign policy toward BRICS.

Kata Kunci
Kebijakan Luar Negeri Indonesia, BRICS, Perspektif Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri

ABSTRAK
BRICS merupakan organisasi internasional yang dibentuk dengan kerja sama ekonomi dan tata kelola global yang lebih adil terhadap negara berkembang. Guna memperkuat pengaruhnya, BRICS berupaya memperluas keanggotaan terhadap negara berkembang lainnya seperti Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi dan pengaruh internasional yang kuat. Penelitian ini bertujuan memahami kebijakan luar negeri Indonesia terhadap eksistensi BRICS melalui interaksi yang telah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dibantu dengan konsep kebijakan luar negeri, khususnya perspektif strategis dalam

kebijakan luar negeri oleh Lovell. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia kerap berhubungan baik dengan BRICS baik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009 – 2013) mau pun Joko Widodo (2014 – 2023). Walaupun wacana mengenai ketergabungan Indonesia dengan BRICS sudah ramai diperbincangkan sejak BRICS terbentuk pada 2009 tetapi hingga 2023 Indonesia belum tergabung menjadi anggota BRICS. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang menarik antara kedua entitas politik tersebut, dan juga mencerminkan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap BRICS.

PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau pendekatan yang dilakukan aktor internasional untuk mencapai tujuan nasional (Hudson, 2017, hal. 14). Sebagai aktor internasional, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri untuk mengatur hubungan luar negeri dalam ranah internasional. Kebijakan luar negeri Indonesia tidak bersifat netral karena bertujuan untuk memperkuat dan menegakkan perdamaian serta tidak memihak terhadap dua blok berseberangan dan menempuh jalannya sendiri dalam menghadapi permasalahan internasional. Selain itu Indonesia juga berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia dan meredakan ketegangan yang ditimbulkan kedua blok (Agung, 2019, hal. 26). Indonesia menyebut politik ini sebagai politik bebas aktif yang kemudian menjadi petunjuk dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia (Agung, 2019, hal. 27). Ranah kebijakan luar negeri tidak terbatas hanya pada hubungan pemerintah saja namun juga interaksi aktor lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Jackson & Sørensen, 2013, hal. 311). Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap organisasi internasional tercermin melalui interaksi yang terjalin antara Indonesia terhadap organisasi internasional termasuk BRICS. Hubungan Indonesia dengan BRICS dilihat sebagai fenomena yang menarik dalam dinamika politik global dan memiliki hubungan yang unik, berbeda dengan organisasi internasional lainnya. Hingga akhir 2023, Indonesia bukan merupakan anggota BRICS meski kerap dianggap sebagai kandidat yang potensial berdasarkan karakteristik dan kedekatannya dengan negara anggota.

BRICS merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengaruh politik besar di dunia internasional. Organisasi ini didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina dengan tujuan menciptakan lingkungan internasional yang damai dengan prinsip demokrasi dan tidak mendukung bentuk keberpihakan dan mentalitas yang tercipta akibat perang dingin. Tujuan utama dari diplomasi yang dilakukan oleh BRICS adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama politik, serta mengadvokasi keadilan dalam sistem internasional (Darnal, 2023). Secara spesifik tujuan politik BRICS berupaya membangun kerja sama politik untuk meningkatkan pengaruh kolektif dalam mengatasi tantangan global. BRICS berupaya mengkoordinasikan posisi mengenai isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama melalui diplomatik, konsultasi, dan pernyataan bersama (Putri & Santoso, 2023). Berbeda dengan organisasi internasional lainnya seperti ASEAN yang berfokus pada kerja sama regional atau G20 yang lebih berorientasi pada koordinasi ekonomi global, BRICS menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional.

BRICS sebagai organisasi dengan umur yang terbilang muda, berupaya memperluas pengaruh dan jangkauannya dengan menyelenggarakan berbagai forum yang mengundang negara di luar keanggotaannya. BRICS berharap forum ini dapat menumbuhkan ketertarikan untuk bergabung dalam organisasinya. Pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi di Afrika Selatan 2023 Agustus lalu, BRICS turut mengundang berbagai negara dunia bagian selatan. Ketertarikan menjadi bagian dari keanggotaan BRICS diungkapkan oleh berbagai negara seperti yang disampaikan oleh (Reuters, 2023)

bahwa lebih dari 40 negara termasuk Indonesia telah mengungkapkan ketertarikan untuk menghadiri KTT di Afrika Selatan. Media lainnya yaitu Al Jazeera juga mengungkapkan "*Speaking of Indonesia's membership, Anil Sookal, South Africa's ambassador to BRICS, said Jakarta had asked for a delay to consult with its Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) counterparts about the move.*" (Llewellyn, 2023). Pernyataan Anil Sooklal sebagai duta besar Afrika Selatan untuk BRICS mengartikan bahwa di antara banyak negara yang mengungkapkan ketertarikannya, Indonesia secara tidak langsung telah menunjukkan minat untuk bergabung dan tengah mengkonsultasikan bersama ASEAN.

Ketertarikan BRICS untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu anggotanya juga didukung dengan kedekatan antara Indonesia dan anggota negara BRICS dalam hubungan bilateral. Akan tetapi, terlepas dari kedekatan Indonesia dengan negara anggota BRICS, Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk bergabung sebagai salah satu anggota BRICS (Tenggara Strategics, 2023). BRICS berupaya menjalin hubungan yang baik dengan Indonesia dengan beberapa kali mengundang Indonesia dalam pertemuan BRICS. Pada tahun 2023 untuk pertama kalinya Indonesia menerima undangan BRICS dan Presiden Jokowi menghadiri pertemuan BRICS di Afrika Selatan. Meski demikian, The Jakarta Post mengungkapkan bahwa "*Indonesia made the point of attending the summit of the club of emerging economies known as BRICS in South Africa last week, but it politely turned down an invitation to join the group*" (Tenggara Strategics, 2023). Melalui pemberitaan yang disampaikan The Jakarta Post, dapat disimpulkan bahwa berbagai media menafsirkan undangan ini sebagai ajakan bergabung terhadap Indonesia untuk menjadi anggota BRICS secara tidak langsung namun saat ini Indonesia menolak ajakan tersebut.

Keputusan untuk bergabung dalam sebuah organisasi dapat diartikan sebagai sebuah pernyataan sikap Indonesia di dunia internasional menjadi pertimbangan Indonesia terhadap eksistensi BRICS. Oleh karena itu pilihan terkait keanggotaan BRICS, tergolong sebagai salah satu bentuk dari kebijakan luar negeri yang dilakukan Indonesia. Kebijakan luar negeri tidak bisa dilihat hanya terbatas pada produk yang dihasilkan saja, melainkan serangkaian proses dan dampak yang dilakukan selama penerapan kebijakan luar negeri (Millar, 1969, hal. 58).Dalam konteks berhubungan dengan BRICS, berbagai tanggapan dan sikap baik formal maupun informal Indonesia, merupakan bagian dari kebijakan luar negeri terhadap eksistensi BRICS.

Melihat fenomena dalam latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang menarik antara BRICS dengan Indonesia. BRICS sebagai organisasi dengan negara besar sebagai anggotanya seperti Rusia dan Cina, terlihat berupaya mendekatkan diri dengan Indonesia dan membuka pintu kepada Indonesia untuk selalu bergabung. Di sisi lain, Indonesia menyatakan tengah mengkaji dan mengalkulasikan berbagai hal terkait keanggotaan dalam organisasi BRICS serta tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan (Nugraheny & Setuningsih, 2023). Sikap Indonesia yang tidak secara tegas menolak maupun menyatakan tidak akan bergabung atau segera mengajukan diri sebagai anggota BRICS membuktikan bahwa keputusan yang akan diberikan oleh Indonesia dihasilkan dari berbagai pertimbangan panjang.

Dalam melakukan penelitian, beberapa peneliti terdahulu juga digunakan sebagai salah satu referensi penyusunan guna menjadi sumber teori maupun informasi untuk menjawab isu yang tengah diambil. Terdapat penelitian yang membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia seperti prinsip, landasan, dan perkembangannya (Anwar, 2001; Gian & Akim, 2020; Haryanto, 2014; Mila dkk., 2020; Sukma, 1995) dan juga penelitian yang membahas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap organisasi internasional (Andrea, 2006; Indrayana, 2024; Jose & Prasetyo, 2021; Riyanto dkk., 2023) yang kemudian menjadi objek utama dalam penelitian ini. Lalu terdapat pembahasan mengenai kebijakan luar negeri yang dianalisis menggunakan teori John P. Lovell (Fathun, 2022; Ramadhan, 2017; Rianda dkk., 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, belum ada yang pernah membahas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap eksistensi BRICS. Penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap eksistensi BRICS Pada Masa Pemerintahan SBY (2009 – 2013) dan Jokowi (2014 – 2023) yang dianalisis menggunakan perspektif strategis John P. Lovell. Perspektif strategis digunakan untuk membantu memahami maksud dan tujuan yang diambil pembuat kebijakan dalam suatu kebijakan. Berbagai interaksi juga telah terjalin oleh kedua pihak seperti pertemuan, pernyataan, dan hal lainnya. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus dengan tujuan membahas berbagai respons Indonesia terhadap eksistensi organisasi BRICS yang dianalisis menggunakan teori kebijakan luar negeri. Selanjutnya, penelitian ini akan dijelaskan secara rinci dengan judul sebagai berikut: "Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Eksistensi BRICS Pada Masa Pemerintahan SBY (2009 – 2013) dan Jokowi (2014 – 2023)".

KERANGKA KONSEPTUAL

Perspektif Strategis Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah konsep yang kompleks dan mengalami perubahan dengan cepat (Lovell, 1970, hal. 27). Guna memahami lebih dalam, melalui buku analisis kebijakan luar negeri dilakukan dengan melibatkan pendalaman kebijakan luar negeri dan menempatkannya dalam konteks akademis yang lebih luas. Pemahaman dapat menggunakan teori dan pendekatan yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian hasil dari kebijakan luar negeri tersebut (Jackson & Sørensen, 2013, hal. 253). Lovell mengelompokkan tiga perspektif analisis dalam memahami kebijakan luar negeri yaitu perspektif strategi, perspektif dinamika sejarah, dan perspektif pengambilan keputusan dalam menganalisis kebijakan luar negeri tertentu (Lovell, 1970, hal. 56). Klasifikasi analisis kebijakan luar negeri ke dalam beberapa kategori untuk memberikan penulis atau pengamat gambaran mengenai perspektif analitis yang telah diidentifikasi. Perspektif strategis menggunakan pola umum berkesinambungan dan perubahan dalam kebijakan luar negeri untuk menjelaskan konteks terhadap tujuan strategis yang diambil pembuat kebijakan. Keputusan tertentu juga dapat digunakan untuk menginterpretasikan pertimbangan taktis kebijakan luar negeri (Lovell, 1970, hal. 57).

Perspektif strategis kebijakan luar negeri dapat digunakan untuk memahami tujuan para pembuat kebijakan dalam kompetisi dengan negara lain. Kebijakan luar negeri yang dianalisis menggunakan perspektif strategis sering kali dilihat sebagai jenis tindakan atau kegiatan apa yang ditekankan (Lovell, 1970, hal. 62). Lovell menggunakan teori permainan atau *theory of game* untuk mengelaborasi analisis perspektif strategis kebijakan luar negeri. Dalam politik internasional lebih dari ratusan negara berupaya mencapai kepentingan tertentu yang bertentangan dengan kepentingan nasional negara lain. Hal ini dilihat Lovell sebagai sebuah permainan dengan aturan tak tertulis yang cenderung informal (Lovell, 1970, hal. 65).

Dalam konteks yang luas, strategi kebijakan luar negeri merupakan rencana yang disusun untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara selagi menghalangi atau mencegah pemain lainnya (aktor internasional) mengganggu rencana tersebut (Lovell, 1970, hal. 66). Strategi sendiri merupakan sebuah rencana untuk mencapai sebuah kesuksesan, maka dalam konteks kebijakan luar negeri strategi adalah rencana yang diambil pembuat kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional selagi mencegah negara lain menghalangi kepentingannya (Lovell, 1970, hal. 66). Terdapat dua komponen strategi kebijakan luar negeri yaitu strategi ofensif dan strategi defensif.

Strategi ofensif merupakan strategi yang memperhitungkan seluruh kemungkinan dampak yang diperoleh dari tindakan tertentu. Perhitungan ini didasari tujuan kebijakan luar negeri, kemungkinan tercapainya tujuan, dan biaya (sumber daya material seperti korban jiwa, biaya, harga diri, dan hal lainnya). Strategi defensif adalah strategi yang digunakan untuk mencegah tindakan dari pihak lain

yang dapat mengancam kepentingan nasional. Rencana untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah ancaman juga merupakan bentuk dari strategi defensif (Lovell, 1970, hal. 67). Maka dapat disimpulkan bahwa strategi ofensif didasarkan pada perkiraan kasar keuntungan yang diperoleh dan risiko kerugian atas sebuah tindakan sedangkan strategi defensif didasarkan pada upaya pencegahan sebuah ancaman (Lovell, 1970, hal. 67). Meskipun berbeda, strategi ofensif dan defensif memiliki perbedaan yang hampir tidak terlihat karena upaya untuk mencapai sebuah kemenangan berarti mencegah pihak lain mengganggu kepentingannya atau defensif. Akan tetapi tindakan ini dapat dianggap ofensif oleh pihak yang merasa kepentingannya dicegah oleh pihak lain (Lovell, 1970, hal. 68).

Kebijakan luar negeri dalam perspektif strategis berupaya untuk menjelaskan pola yang terlihat untuk mengkalkulasikan pertimbangan yang diambil pembuat kebijakan terhadap tujuan tertentu. Meskipun penggunaan data tertentu tidak dapat mendeskripsikan dengan pasti maksud dari pembuat kebijakan, kebijakan luar negeri kerap membuat sebuah pola yang dapat diidentifikasi. Analis kebijakan luar negeri menggunakan perspektif strategis untuk menyimpulkan alasan dibalik tindakan yang diambil oleh pembuat kebijakan menggunakan beberapa variabel utama pembentukan kebijakan (Lovell, 1970, hal. 69). Lovell menggunakan lima variabel kunci dalam menganalisis kebijakan luar negeri dengan perspektif strategis yaitu *parties and alignments* (pihak yang terlibat dan kesinambungan lainnya), *stakes of the game* (keuntungan yang didapat dalam permainan), *capability estimates* (estimasi kemampuan), *estimates of the strategies of the other parties* (estimasi strategi pihak lain), dan *rules of the game* (aturan permainan).

Sebagaimana dijelaskan oleh Lovell (1970, hal.125) perspektif strategi yang dilengkapi lima kunci variabel dapat memahami sudut pandang pembuat kebijakan untuk menjelaskan pertimbangan atau pola dalam konteks strategi. Strategi ini diambil pembuat kebijakan untuk dapat memenangkan "permainan" dalam politik internasional sehingga penulis bisa menjelaskan keputusan spesifik dalam konteks tertentu. Dengan memahami tindakan tertentu dalam berbagai konteks, strategi yang digunakan pembuat kebijakan akan dapat dipahami melalui tindakan tersebut Lovell (1970, hal.126). Perspektif strategi yang mengidentifikasi pertimbangan menjadi sebuah pola dapat memahami tujuan dan nilai yang ingin dicapai atau nilai yang ingin dijaga oleh pembuat kebijakan dalam jangka panjang. Tujuan dan nilai ini dapat berupa gambaran atas identitas nasional dan juga kepentingan nasional yang memberikan pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Upaya untuk mengetahui tujuan mengacu pada objektif kebijakan luar negeri tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan konteks kebijakan luar negeri Lovell (1970, hal.149).

METODE RISET

Desain penelitian yang akan digunakan penulis dalam merampungkan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan fokus multi-metode yang menggunakan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap topik yang dibahas (Sidiq & Choiri, 2019). Maka penelitian kualitatif mempelajari konteks alamiah dan berupaya memahami atau menafsirkan fenomena berdasarkan makna dari fenomena tersebut. Penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, wawancara, sejarah, kisah hidup, observasi, interaksional, dan teks visual. Hal ini digunakan untuk menggambarkan momen sebagai penjabaran fenomena dalam peristiwa atau kejadian yang dialami oleh individu (Aspers & Corte, 2019). Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena dapat membantu mendalami dan menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap eksistensi BRICS.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan unit analisis negara (*state*) yang terbagi menjadi objek penelitian yaitu kebijakan luar negeri Indonesia terhadap eksistensi BRICS tahun 2009 – 2023 dan unit eksplanasi yaitu kebijakan luar negeri Indonesia terhadap eksistensi BRICS 2009 -

2023. Penelitian ini dilakukan berbasis internet dengan mendalami serta meneliti objek penelitian seperti berbagai kejadian terdahulu, prinsip dan landasan negara, organisasi yang bersangkutan, serta data lain yang dilakukan. Peneliti menggunakan teknik studi literatur dengan mendalami penelitian melalui buku, jurnal, berita, dokumen resmi kementerian, dan penelitian yang bersumber dari internet hingga kebijakan (Afiyanti, 2005) yang telah diambil Indonesia terkait organisasi BRICS. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang merujuk pada studi literatur seperti artikel jurnal, buku, berita, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penggunaan teknik analisis data yang lebih spesifik. Teknik yang digunakan untuk merampungkan penelitian ini adalah *discourse analysis*. Analisis diskursus merupakan teknik yang melibatkan identifikasi dan interpretasi pola bahasa dan komunikasi yang dilakukan oleh objek penelitian. Melalui buku yang ditulis oleh James Paul Gee, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis diskursus seperti pendekatan pikiran, interaksi, aktivitas, masyarakat, institusi, budaya, dan lainnya. Analisis mengenai intonasi suara, penggunaan dan pemilihan kata dalam berkomunikasi, dan hal lainnya juga dilakukan dalam teknik ini (Gee, 2014). Dengan menggunakan analisis diskursus dapat membantu memahami motivasi, kepentingan, ketertarikan, dan nilai dalam sebuah tindakan. Teknik analisis diskursus menganalisis berbagai bentuk teks seperti percakapan, pidato, wawancara, naratif, maupun publikasi media (Schiffrin dkk., 2001). Penggunaan analisis diskursus dibutuhkan karena dapat membantu mengkaji alasan dibalik tanggapan atau respons Indonesia terhadap keanggotaan BRICS seperti landasan politik luar negeri, keselarasan budaya, pertimbangan berbagai aspek, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemunculan organisasi internasional BRICS yang ditandai dengan pertemuan pertamanya pada 2019 menarik perhatian seluruh dunia. Pasalnya di tengah krisis ekonomi global yang melanda dunia, negara anggota BRICS memiliki ekonomi yang cenderung stabil dan kemampuan dalam menangani krisis. Kemampuan tersebut memberikan BRICS kredibilitas untuk mengubah sistem internasional dan membuktikan legitimasi Amerika Serikat di dunia mulai berkurang dan memberi peluang bagi kekuatan baru untuk berkembang (Stuenkel, 2014, hal. 89). Seiring dengan perkembangannya, BRICS kerap menjalin interaksi dengan negara lain termasuk Indonesia meskipun Indonesia telah mengalami pergantian kepala negara.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap BRICS Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009 – 2014)

BRICS pertama kali berdiri pada tahun 2009 dengan nama BRIC, tepatnya ketika Brasil, Rusia, India, dan Cina melakukan pertemuan pertamanya di Yektarinburg, Rusia dan membentuk kelembagaan untuk menjadi blok aspiratif negara berkembang (Chatterjee & Naka, 2022). Di tahun yang sama, Indonesia baru saja mengalami pesta demokrasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemenangnya dan menjalani tanggung jawabnya sebagai presiden periode keduanya. Dalam dunia internasional pada pemerintahan SBY, Indonesia dikenal dengan kemampuannya berkontribusi dalam perdamaian sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2004 – 2009 dan 2010 – 2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, 2005).

Ketika BRIC pertama kali dikenal dalam dunia internasional, Indonesia telah digadang-gadang memiliki kemiripan dan dinilai cocok untuk bergabung menjadi salah satu anggota BRIC. Hal ini diungkapkan oleh Chetan Ahya yang merupakan salah satu ahli ekonomi Morgan Stanley sebagai

bank milik Amerika Serikat. Melalui artikel Bloomberg yang ditulis oleh Ghosh dengan judul '*BRIC Should Include Indonesia, Morgan Stanley Says*, Ahya menyampaikan secara ekonomi Indonesia memiliki kemampuan untuk bergabung dengan BRIC didukung dengan perekonomian Indonesia yang dinilai dapat berkembang hingga tujuh persen pada tahun 2011 (The Economic Times, 2009). Secara publik Morgan Stanley menyampaikan bahwa BRIC dapat berganti nama menjadi BRIIC atau BRICI dengan Indonesia sebagai abjad I selain India (China Daily, 2009; Jacquier, 2011). Hal ini membuktikan dunia internasional telah memperkirakan keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional BRIC.

Pelaku ekonomi Indonesia seperti industri perbankan juga menyambut organisasi internasional BRIC dengan positif. Pada 27 Oktober 2010, Bank Mandiri sebagai salah satu bank besar di Indonesia mengadakan forum ekonomi nasional yang bertajuk '*Indonesia the next I in BRICI?*' untuk mendukung kemajuan ekonomi Indonesia dan menyeleraskan dengan pada negara berkembang termasuk dengan BRIC. Dalam forum tersebut, Riswinandi sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri menyampaikan karakteristik negara anggota BRIC memiliki kesamaan dengan Indonesia. Kapasitas ekonomi dan kinerja ekonomi Indonesia juga tergolong baik dan istimewa sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai anggota BRIC. Setelah diterpa krisis finansial global pada tahun 2008, kinerja ekonomi Indonesia juga menunjukkan daya tahan dan perbaikan yang positif (The Jakarta Post, 2010).

Setelah kerap digadang-gadang menjadi salah satu anggota BRIC, Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan terhadap eksistensi BRIC pada 14 Desember 2010. Tanggapan ini disampaikan secara verbal pada kuliah umum yang diberikan oleh Presiden SBY pada Dies Natalis ITS Surabaya (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2010). Dalam kuliah umum yang diberikan, SBY beberapa kali menyinggung BRIC dan hubungannya dengan Indonesia. Disampaikan dalam kurun waktu lima belas tahun mendatang, Indonesia memiliki tujuan sebagai negara *emerging economy* (negara berkembang yang bergerak menuju negara maju ditandai pertumbuhan ekonomi tinggi) seperti negara anggota BRIC. Upaya perwujudan *emerging economy* dapat dilakukan dengan bergabung menjadi anggota BRIC sehingga mampu mengoptimalkan potensi ekonomi nasional Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2010).

Pada kesempatan tersebut, SBY juga mengutip beberapa sumber internasional seperti majalah *Foreign Policy* dan perkataan Morgan Stanley mengenai keterkaitan dan kecocokan Indonesia dengan BRIC. Sebagaimana disampaikan oleh SBY, berdasarkan majalah *Foreign Policy* yang berjudul 'Fenomena yang Luput dari Perhatian Dunia 2010', Indonesia memiliki julukan '*Indonesia Tiger*' yang merujuk pada kemampuan ekonomi Indonesia yang terus mengalami perkembangan (*progressing*). Melalui majalah tersebut juga tertulis istilah BRIC akan memiliki I tambahan menjadi BRICI dalam waktu cepat atau lambat. SBY juga mengutip perkataan Morgan Stanley pada Juli 2009 bahwa BRIC harus ditambah dengan satu I yaitu Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2010). Hal serupa kembali disampaikan SBY pada 3 Januari 2011 dalam sesi tanya jawab pembukaan perdagangan bursa efek ketika seorang pelaku usaha menanyakan kemampuan Indonesia dalam menyamakan langkah dengan negara BRIC. SBY meyakini bahwa Indonesia dapat bergabung dengan BRIC karena Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sejajar dengan anggota BRIC untuk menjadi *emerging countries* (Wibowo dkk., 2011).

Dukungan dan harapan Indonesia untuk bergabung dengan BRIC tidak hanya diungkapkan oleh SBY sebagai Presiden Indonesia saja tetapi juga aktor lain seperti Duta Besar Indonesia. Djauhari Oratmangun sebagai Duta Besar Indonesia untuk Rusia mengungkapkan harapan agar BRIC bisa ditambah dengan Indonesia sehingga menjadi BRIIC. Hal ini ditulis dalam artikel Tabloid Diplomasi sebagai tabloid terbitan Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan artikel berjudul 'Aliansi Strategis Indonesia – ASEAN – Rusia' pada 19 Maret 2012. Ia mengungkapkan peran penting Indonesia dalam

ASEAN membuat Indonesia memiliki daya tawar yang kuat dan sangat besar kemungkinan untuk bergabung dengan BRIC (Oratmangun, 2012). Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang pejabat Kementerian Luar negeri Indonesia yang tertulis dalam artikel Russia Beyond the Headlines. Secara tak resmi, disampaikan bahwa Indonesia menyambut positif undangan dalam bergabung dengan BRICS tetapi Indonesia masih harus memastikan konsensus di antara para anggota. Ia juga menyampaikan bahwa Rusia, Brasil, dan India tampak antusias dengan gagasan ketergabungan Indonesia dalam BRICS (Kamalakaran, 2013).

Tabel 1. Tabulasi Interaksi Indonesia dan BRICS Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009 - 2013)

No	Tanggal	Aktor		Kegiatan
		Nama	Instansi	
1	15/06/2009	Chetan Ahya	Ahli Ekonomi Morgan Stanley	Mengatakan Indonesia akan menjadi anggota BRIC selanjutnya yang kemudian akan berubah menjadi BRIIC
2	27/10/2010	Riswinandi	Wakil Direktur Utama Bank Mandiri	Mandiri mengadakan forum ekonomi nasional yang bertajuk '*Indonesia the next I in BRICI?*'
3	14/12/2010	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden Indonesia Ke-6	Mengutip bahwa cepat atau lambat Indonesia akan menjadi anggota BRIC
4	03/01/2011	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden Indonesia Ke-6	Meyakini Indonesia dapat bergabung BRIC
5	19/03/2012	Djauhari Oratmangun	Duta Besar Indonesia untuk Rusia	Menulis salam artikel 'Aliansi Strategis Indonesia – ASEAN – Rusia' yang mengungkap peluang besar Indonesia bergabung dengan BRIC
6	18/11/2013		Pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia	Menyampaikan pada Russia Beyond the Headlines bahwa Indonesia menyambut positif undangan bergabung tetapi masih perlu pertimbangan

Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap BRICS Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014 – 2023)

Pada masa Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, hubungan antara Indonesia dengan organisasi internasional BRICS tetap terjalin dengan baik dan bahkan Indonesia menghadiri pertemuan BRICS untuk pertama kalinya di Afrika Selatan. Akan tetapi, Jokowi memiliki langkah yang berbeda dengan SBY dalam menjalin hubungan dengan BRICS. Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia beberapa kali mengungkapkan ketertarikannya dalam menjadi bagian dari keanggotaan BRICS dan secara aktif merespons berita ini dengan baik. Di lain sisi, pada masa pemerintahannya Jokowi tidak terlalu fokus dan tidak banyak memberikan komentar mengenai BRICS dan baru terlihat aktif berhubungan sejak tahun 2022. Hal ini berhubungan dengan arah politik luar negeri Jokowi yang memiliki empat fokus diplomasi dan satu tujuan yang menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Kerangka politik ini adalah diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, diplomasi perlindungan, dan peningkatan kontribusi kepemimpinan Indonesia (Situmorang, 2015).

Meskipun tidak terlihat menjalin kedekatan dengan baik, pada 18 Oktober 2018 Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat menjadi salah satu pembicara dalam '*Fourth Forum on Small Business of the SCO and BRICS Regions'* di Ufa, Bashkortostan Rusia. Forum ini merupakan forum kerja sama antara Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang berkolaborasi dengan Shanghai Cooperation Organization. Jawa Barat sendiri diundang secara khusus oleh Republik Bashkortostan selaku tuan rumah forum karena telah menjalin kerja sama *sister province*. Dalam kesempatan ini,

Ridwan Kamil mempromosikan ekonomi inklusif yang berfokus pada usaha kecil dan menengah serta desa berbasis revolusi digital di Jawa Barat (Ramdhani & Demanik, 2018).

Pada tahun 2022 ketika pertemuan tahunan BRICS diselenggarakan di China, Indonesia kerap berpartisipasi secara aktif menjadi tamu undangan dalam pertemuan BRICS menunjukkan hubungan akrab dengan negara anggota BRICS dan BRICS sebagai organisasi internasional. Pada 20 Mei 2022, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia menghadiri pertemuan '*Dialogue of Foreign Ministers between BRICS and Emerging Markets and Developing Countries*'. Pada kesempatan tersebut, Cina sebagai penyelenggara pertemuan membuka kesempatan negara lain untuk bergabung dalam organisasi BRICS untuk menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan tata kelola global yang rasional. Menteri luar negeri yang tergabung dalam pertemuan tersebut seperti Arab Saudi, Argentina, Mesir, dan Uni Emirat Arab juga menyatakan dukungan multilateralisme, mempertahankan prinsip Piagam PBB, dan menjaga ketahanan negara berkembang (Ilmie, 2022; Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China, 2022).

Secara resmi, Jokowi sebagai Presiden Indonesia juga memiliki interaksi dengan organisasi internasional BRICS. Melalui forum *'High-level Dialogue on Global Development*' yang dilaksanakan secara virtual pada 24 Juni 2022, Ia menyampaikan pidatonya yang mengusulkan tiga langkah yang harus dijalankan bersama oleh negara berkembang untuk menghindari terjadinya dekade pembangunan yang hilang. Forum ini dipimpin oleh Presiden Cina yaitu Xi Jinping dan diikuti pemimpin negara anggota BRICS dan turut mengundang pemimpin negara berkembang yang relevan dengan pembahasan forum. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan BRICS harus mampu menjadi katalis penguatan investasi negara berkembang yang memajukan pendanaan inovatif. Ia juga mengungkapkan kerja sama BRICS dengan negara mitra harus mendukung transformasi digital, pengembangan industri dan infrastruktur hijau, serta penguatan akses negara berkembang (BPMI Setpres, 2022).

Keikutsertaan menteri luar negeri dan presiden dalam forum yang diselenggarakan BRICS kembali menghidupkan narasi keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional BRICS. Jery Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bergabung dengan BRICS dan akan mengkaji lebih lanjut. Ia juga mengangkat narasi seharusnya BRICS memiliki dua huruf I yaitu India dan Indonesia (CNN Indonesia, 2023). Pernyataan yang disampaikan pada 4 Mei 2023 ini diikuti dengan berbagai keikutsertaan Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia dalam acara dan forum yang diselenggarakan oleh BRICS. Hal ini menandakan kedekatan hubungan antara Indonesia dengan organisasi internasional.

Pada 2 Juni 2023, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia menghadiri pertemuan '*The Friends of BRICS Foreign Ministers*' secara virtual. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri anggota BRICS dan 14 negara undangan lainnya seperti Arab Saudi, Argentina, Mesir, dan Indonesia. Melalui pertemuan tersebut, Retno mengajak negara anggota BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan negara dan memperkuat multilateralisme. Dunia yang terpecah menjadi blok-blok berseberangan berpotensi merugikan negara berkembang sehingga negara berkembang bertanggung jawab untuk memperbaiki tatanan global yang tidak sehat. Retno meyakini bahwa BRICS memiliki potensi untuk menjadi kekuatan positif tersebut dengan mendorong hak atas pembangunan masing-masing negara dan memperkuat multilateralisme (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2023).

Meningkatnya hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan BRICS juga terlihat dari undangan pertemuan tahunan BRICS di Afrika Selatan yang diberikan Indonesia kepada Indonesia. Diplomat Afrika Selatan bernama Anil Sooklal menyampaikan Indonesia merupakan satu dari empat puluh negara yang mengekspresikan ketertarikannya untuk mengikuti pertemuan tahunan tersebut (Reuters,

2023). Pada 12 Juli 2023, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Indonesia yaitu Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan melalui akun resmi Instagramnya bahwa Presiden Indonesia akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS secara langsung (Kamalina, 2023). Hal ini semakin meningkatkan isu kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS yang kemudian dijawab oleh Teuku Faizasyah sebagai Juru Bicara Kementerian Luar Negeri pada 1 Agustus 2023. Ia menyampaikan putusan resmi atau kebijakan yang berkaitan akan disampaikan pada waktunya karena untuk bergabung dengan sebuah organisasi memerlukan serangkaian proses yang perlu dilalui (Agustin & Dikarma, 2023). Jokowi sebagai Presiden Indonesia juga mendapatkan pernyataan serupa yakni "Nanti diputuskan," ketika ditanya mengenai kabar potensi Indonesia bergabung dengan BRICS pada 7 Agustus 2024 (Pribadi, 2023).

Pada 24 Agustus 2023 Jokowi mewakili Indonesia menghadiri KTT BRICS ke-15 di Sandton Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan. Selain Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri, Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, dan Saud Purwanto Krisnawan sebagai duta besar untuk Afrika Selatan turut menemani Jokowi dalam kunjungannya di Afrika Selatan (BPMI Setpres, 2023a) Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan pentingnya negara berkembang untuk memperjuangkan hak dan seruan menghapuskan diskriminasi terhadap upaya kemajuan negara-negara berkembang. Jokowi juga menyerukan kerja sama yang setara dan inklusif antar negara berkembang dan menyampaikan negara anggota BRICS berperan penting dalam memperjuangkan keadilan pembangunan (BPMI Setpres, 2023b).

Isu ketergabungan Indonesia ke dalam BRICS dijawab Jokowi setelah menghadiri KTT BRICS melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Ia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia belum menyampaikan surat *expression of interest* yang seharusnya diberikan apabila Indonesia ingin mengajukan diri menjadi anggota BRICS. Pemerintah Indonesia tengah mengkaji dan mengkalkulasikan berbagai hal terkait keanggotaan dalam organisasi BRICS serta tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga mengungkapkan kedekatan Indonesia dengan lima negara anggota BRICS terutama bidang ekonomi (Nugraheny & Setuningsih, 2023).

Selain Jokowi, Retno juga turut memberikan pernyataan mengenai isu ketergabungan Indonesia dalam BRICS. Pada rapat kerja bersama Komisi I DPR Indonesia 31 Agustus 2023, Ia menyampaikan bahwa menteri luar negeri negara anggota BRICS tengah berupaya melakukan pendekatan agar Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota BRICS. Akan tetapi saat ini Indonesia masih melakukan kajian internal dari berbagai sisi seperti politik dan ekonomi. Serupa dengan pernyataan Jokowi, Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia belum mengirimkan surat *expression of interest* pada BRICS. Meski begitu Ia menekankan bahwa secara individu Indonesia memiliki hubungan yang kokoh dengan seluruh negara anggota BRICS (Khalida, 2023).

Tabel 1. Tabulasi Interaksi Indonesia dan BRICS Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014 - 2023)

No	Tanggal	Aktor		Kegiatan
		Nama	Instansi	
1	18/10/2018	Ridwan Kamil	Gubernur Jawa Barat	Narasumber '*Fourth Forum on Small Business of the SCO and BRICS Regions'* di Ufa, Bashkortostan Rusia.
2	20/05/2022	Retno Marsudi	Menteri Luar Negeri Indonesia	Menghadiri pertemuan '*Dialogue of Foreign Ministers between BRICS and Emerging Markets and Developing Countries'*
3	24/06/2022	Joko Widodo	Presiden Indonesia Ke-7	Hadir dan berpidato dalam forum '*High-level Dialogue on Global Development*'

4	04/05/2023	Jery Sambuga	Wakil Menteri Perdagangan	Mengangkat narasi kemungkinan Indonesia bergabung BRICS
5	02/06/2023	Retno Marsudi	Menteri Luar Negeri Indonesia	Menghadiri pertemuan '*The Friends of BRICS Foreign Ministers'* secara virtual.
6	12/07/2023	Luhut Binsar Pandjaitan	Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Indonesia	Menyampaikan Presiden Indonesia akan menghadiri KTT BRICS secara langsung di Afrika Selatan
7	01/08/2023	Teuku Faizasyah	Juru Bicara Kementerian Luar Negeri	Mengatakan butuh proses untuk bergabung dengan BRICS
8	07/08/2024	Joko Widodo	Presiden Indonesia Ke-7	Mengatakan putusan ketergabungan akan diputuskan nanti
9	24/08/2023	Joko Widodo	Presiden Indonesia Ke-7	Menghadiri KTT BRICS ke-15 dan berkesempatan menyampaikan pidato dalam forum
10	24/08/2023	Joko Widodo	Presiden Indonesia Ke-7	Menyatakan Indonesia tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan melalui akun YouTube
11	31/08/2023	Retno Marsudi	Menteri Luar Negeri Indonesia	Menyampaikan menteri luar negeri BRICS berupaya mendekati Indo yang tengah melakukan kajian internal

Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan BRICS (2009 – 2023) Berdasarkan Lima Kunci Variabel Perspektif Strategis Lovell

Perspektif strategi dalam menganalisis kebijakan luar negeri digunakan untuk memahami tujuan pembuat kebijakan yang dilihat sebagai jenis tindakan atau kegiatan apa yang ditekankan (Lovell, 1970, hal. 62). Melalui perspektif strategi, pola dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan dapat terlihat sehingga dapat disimpulkan alasan dibalik tindakan yang diambil (Lovell, 1970, hal. 69). Tindakan atau respons yang diambil Indonesia terhadap eksistensi BRICS merupakan bagian dari kebijakan luar negeri. Berbagai bentuk kebijakan luar negeri terhadap eksistensi BRICS pada tahun 2009 – 2023 akan dianalisis terhadap lima variabel kunci dari perspektif strategi yang dijelaskan oleh Lovell yaitu *parties and alignment, stake of the game, capability estimates, estimates of the strategies of others,* dan *rules of the game*. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis pertimbangan yang diambil pembuat kebijakan serta alasan dibalik tindakan yang berkaitan dengan BRICS.

Pihak-pihak terlibat (*parties*) dan keselarasannya (*alignment*) ditandai dengan kerja sama dan interaksi antar pihak merupakan salah satu kunci untuk memahami perspektif strategi kebijakan luar negeri menurut Lovell. Para pihak terkait kemudian bertindak sebagai upaya untuk 'memenangkan permainan' seperti bernegosiasi dan membentuk koalisi (Lovell, 1970, hal. 70). Kebijakan dengan variabel kunci *parties and alignment* dicirikan dengan mengidentifikasi apakah terdapat aktor atau koalisi yang menjadi fokus kebijakan dan juga apakah terdapat upaya membangun koalisi dengan anggota BRICS atau pihak lainnya yang relevan. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam perspektif *parties and alignment* mencerminkan upaya Indonesia dalam membangun dan memelihara hubungan dengan BRICS dan anggotanya. Di bawah kepemimpinan SBY (2009 – 2014) yang bertepatan dengan terbentuknya BRICS (2009) Indonesia menunjukkan ambisi untuk sejajar dengan negara BRICS dan juga upaya untuk menjadi salah satu anggota BRICS. Di sisi lain pada era Jokowi (2015 – 2023) hubungan Indonesia dan BRICS menguat terutama pada periode keduanya dalam aspek ekonomi dengan diplomasi pragmatis. Interaksi ini dipengaruhi dengan keberadaan Cina sebagai negara pendiri BRICS yang juga merupakan mitra dagang besar Indonesia. Kehadiran Indonesia dalam berbagai inisiatif BRICS menunjukkan keseriusan dalam membangun hubungan strategis dan mencerminkan

strategi diplomasi Indonesia mengambil peran di antara negara berkembang dan menegaskan pentingnya BRICS dalam mencapai tujuan ini.

Kunci variabel *stake of the game,* merupakan perkiraan terhadap suatu fenomena dapat mengancam kepentingan nasional negaranya. Lovell menekankan pada variabel kunci *stake of the game* dapat ditemukan perbedaan kepentingan nasional yang menimbulkan variasi dalam strategi dan intensitas permainan (Lovell, 1970, hal. 72). Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap eksistensi BRICS diidentifikasi dengan melihat intensitas kepentingan kebijakan terhadap kepentingan nasional Indonesia dan bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan prioritas dalam berhubungan dengan BRICS. Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap eksistensi BRICS menunjukkan kepentingan nasional sangat mempengaruhi keputusan Indonesia terkait BRICS. Optimisme besar untuk menjadi bagian dari BRICS terlihat pada masa pemerintahan SBY (2009 – 2014) sebagai upaya mengambil peran dalam dunia internasional dan representasi negara berkembang. Pada masa pemerintahan Jokowi (2015 – 2023) fokus peningkatan peran Indonesia di dunia global yang berlandaskan bebas aktif juga terlihat dalam tindakan Indonesia menjalin hubungan dengan BRICS dengan penuh pertimbangan. Kebijakan Indonesia terhadap eksistensi BRICS menunjukkan strategi *stake of the game* yang hati-hati dan terukur serta mempertimbangkan faktor kepentingan nasional dalam pelaksanaannya.

Analisis strategi pembuat kebijakan luar negeri dapat dilakukan dengan melihat estimasi kapabilitas (*capability estimates*) yang dilakukan dengan menduga faktor yang dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan (Lovell, 1970, hal. 72). Estimasi kapabilitas dilakukan sebagai petunjuk atas strategi yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan (Lovell, 1970, hal. 73). Analisis variabel kunci *capability estimates* dapat dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana Indonesia menilai kapabilitas terkait BRICS dari berbagai aspek seperti ekonomi, politik, atau diplomatik dalam mencapai kepentingannya. Berbagai potensi dan kapabilitas BRICS dalam berbagai aspek seperti ekonomi, diplomasi, dan politik mempengaruhi Indonesia dalam mengambil kebijakan. Pada masa pemerintahan SBY (2009 – 2014), Indonesia menunjukkan optimisme terhadap kapabilitas ekonomi BRICS yang dapat mendukung perekonomian Indonesia. Selain itu kapabilitas diplomasi BRICS juga memberikan Indonesia peluang untuk memperkuat daya tawar dalam tingkat internasional. Pada masa pemerintahan Jokowi (2015 – 2023), kehadiran pemimpin dan pejabat Indonesia dalam berbagai forum menunjukkan pengakuan Indonesia terhadap kapabilitas BRICS yang dapat berperan positif bagi negara berkembang. Melalui berbagai kesempatan juga diungkap BRICS dapat mendukung pembangunan ekonomi, menjaga keseimbangan tata kelola global, dan berbagai hal lainnya. Strategi *capability estimates* menunjukkan bahwa strategi yang diambil Indonesia berorientasi pada pemanfaatan kapabilitas BRICS untuk mendukung kepentingan yang dimiliki Indonesia.

Pengambilan kebijakan luar negeri didasari oleh pertimbangan strategi pihak lain sehingga memerlukan strategi, antisipasi, dan respons atas tindakan pihak yang terlibat. (Lovell, 1970, hal. 73). Perkiraan ini merupakan variabel kunci *estimates of the strategies of others* yang ditemukan dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap eksistensi BRICS tahun 2009 – 2023 dengan identifikasi pandangan Indonesia terhadap strategi BRICS atau anggota BRICS dan pengaruhnya terhadap kebijakan Indonesia. Analisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap BRICS melalui perspektif *estimates of the strategies of others*, Indonesia mengamati dan mempelajari strategi serta langkah BRICS melalui berbagai kesempatan. Pada masa pemerintahan SBY, penggunaan kutipan aktor internasional mengenai potensi Indonesia dalam menjadi bagian dari BRICS menunjukkan Indonesia mengamati dinamika dan pendapat internasional untuk dapat menyusun strategi posisi Indonesia dalam kondisi tertentu. Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai forum yang berkaitan dengan BRICS serta kerap menyampaikan pendapat internasional berdasarkan

pertemuan tersebut menunjukkan upaya Indonesia dalam menjalin kerja sama dan menekankan hubungan yang baik dengan anggota BRICS.

Lovell (1970, hal. 74) mengungkapkan analisis kebijakan luar negeri perspektif strategi, *rules of the game* digunakan untuk memahami perspektif pembuat kebijakan. Kebijakan dapat mengalami perubahan karena aturan dan aturan dapat mengalami perubahan karena kebijakan (Lovell, 1970, hal. 74). Berdasarkan interaksi yang terjalin antara Indonesia dengan BRICS, kebijakan dengan variabel kunci *rules of the game* dicirikan dengan mengidentifikasi apakah terdapat norma atau aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mempengaruh pendekatan Indonesia terhadap BRICS. Pada dasarnya tidak ada peraturan tertulis yang mengatur hubungan Indonesia dengan BRICS sehingga hubungan dapat bersifat dinamis dan berubah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tidak adanya kerangka tertulis yang membatasi langkah Indonesia terhadap BRICS juga dapat membuat perubahan arah kebijakan di masa depan.

Karakteristik Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap BRICS Pada Masa Pemerintahan SBY (2009 – 2013) dan Jokowi (2014 – 2023)

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap eksistensi BRICS pada tahun 2009 – 2023 yang dianalisis menggunakan perspektif strategi Lovell dapat membantu memahami sudut pandang pembuat kebijakan. Analisis kebijakan dibantu dengan lima variabel kunci yaitu *parties and alignment, stake of the game, capability estimates, estimates of the strategies of others,* dan *rules of the game*. Melalui analisis ini, perbedaan karakteristik kebijakan luar negeri Indonesia terhadap eksistensi BRICS pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi dapat dianalisis lebih lanjut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh John P. Lovell dalam bukunya, strategi kebijakan luar negeri merupakan serangkaian rencana untuk meraih kepentingan nasional sebuah negara. Strategi sebagai upaya yang disusun untuk mencapai tujuan menjadikan perspektif strategis dalam kebijakan luar negeri sebagai langkah yang diambil pembuat kebijakan untuk kepentingan nasionalnya (Lovell, 1970, hal. 66). Bagaimana kepentingan nasional berperan besar dalam penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan luar negeri dapat terlihat pada interaksi yang terjadi di antara Indonesia dan BRICS. Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian teknik, cara, pedoman, proses, dampak, dan bentuk lainnya yang diambil sebuah negara dan berdampak dalam lingkup internasional. Oleh karena itu segala sesuatu interaksi yang dilakukan Indonesia dan memiliki dampak atau keterkaitan dengan BRICS disebut sebagai kebijakan luar negeri Indonesia.

Hubungan erat antara Indonesia dan BRICS tidak serta merta didasari hanya pada persamaan Indonesia dengan negara anggotanya saja yaitu negara berkembang. Berbagai interaksi yang diambil memiliki kepentingan yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kepentingan nasional yang didukung dengan situasi internasional. Landasan utama gerakan Indonesia di ranah internasional adalah prinsip politik luar negeri bebas aktif. Namun setiap tahunnya Indonesia tetap memiliki arah kebijakan luar negeri yang berbeda tersusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) yang berganti selama lima tahun sekali menyesuaikan dengan kepentingan nasional. Pembaharuan RPJMN sesuai dengan periodenya diikuti dengan pergantian kabinet presiden yang juga hanya memiliki periode selama lima tahun. Dengan begitu, arah kebijakan luar negeri Indonesia dapat berubah seiring dengan pergantian atau bahkan perpanjangan periode seorang presiden.

BRIC yang dibangun pada tahun 2009 bertepatan dengan tahun pertama periode kedua Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa itu Indonesia dikenal dengan kemampuan ekonominya dan peran besar SBY dalam dunia internasional menjadikan Indonesia dipandang sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki pengaruh besar. Melalui RPJMN 2010 – 2014, politik luar negeri Indonesia juga tertuang dalam salah satu Delapan Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan internasional dan

dihormati di dunia internasional (Republik Indonesia, 2010, Bab III.22). Kemunculan BRIC sebagai organisasi internasional yang bertujuan mengubah tata kelola global cukup menggemparkan dunia. Indonesia dinilai menjadi salah satu negara yang berpotensi kuat bergabung dengan BRIC bahkan memunculkan istilah baru di kalangan masyarakat yaitu BRIIC dan juga BRICI dengan Indonesia sebagai negara tambahannya. Kemunculan BRIC yang diawali dari keberhasilan negara berkembang menangani krisis moneter 2008, menjadikan negara anggota BRIC mendapat kesan kuat dan berani untuk mendobrak tatanan global. Indonesia sebagai negara berkembang dengan kesan serupa dianggap sangat cocok bergabung dengan Brasil, Rusia, India, dan Cina. Oleh karena itu, SBY sebagai kepala negara dalam berbagai kesempatan terlihat mengaitkan dan memberi sinyal positif mengenai peluang Indonesia bergabung dengan BRIC.

Pada tahun 2014 ketika Indonesia mengalami pergantian presiden menjadi Joko Widodo (Jokowi), kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan perbedaan. Pada periode pertamanya (2015 – 2019), sejauh yang ditemukan penulis Jokowi tidak sekalipun memberi tanggapan mengenai organisasi internasional BRICS. Hal ini cukup wajar, mengingat pada masa itu dunia internasional mulai mempertanyakan progres dari organisasi dan meragukan tercapainya tujuan BRICS untuk menggeser dominasi negara maju. Berdasarkan RPJMN 2015 – 2019, Indonesia memiliki terdapat Nawa Cita atau sembilan agenda prioritas yang salah satunya berisi meningkatkan produktivitas dan daya saing internasional (Republik Indonesia, 2015, Bab V.1-5). Jokowi juga dikenal dengan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan kerja sama luar negeri untuk kepentingan domestik. Oleh karena itu berbeda dengan presiden sebelumnya, Jokowi jarang terlihat hadir dalam forum internasional dan jarang terdengar dalam topik internasional yang tidak melibatkan kepentingan dalam negeri.

Meningkatnya interaksi antara Indonesia dengan BRICS baru mulai kembali terlihat pada tahun 2022, ketika Cina menjadi ketua Konferensi Tingkat Tinggi BRICS. Dalam berbagai kesempatan menteri luar negeri bahkan presiden mengikuti pertemuan BRICS yang mayoritasnya diorganisir oleh Cina. Kebijakan luar negeri yang terbentuk didasari dengan kepentingan nasional, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan nasional dengan Cina. Pada masa periode keduanya, Jokowi banyak menekan kerja sama dengan Cina dalam berbagai sektor dan Cina juga merupakan mitra impor terbesar Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam forum dapat dipahami sebagai upaya Indonesia dalam menjaga keharmonisan dan menghormati tuan rumah yaitu Cina.

Kedekatan dengan BRICS terjalin erat bahkan pada tahun 2023 Indonesia semakin banyak melakukan interaksi dengan BRICS. Jokowi mewakili Indonesia untuk pertama kalinya menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan. Sebelum menghadiri pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Indonesia juga menjalin kedekatan dengan menteri lainnya dengan hadir dalam forum BRICS. Melalui pidatonya, Jokowi menyampaikan hadir mewakili ASEAN sebagai Ketua ASEAN 2023. Hal ini dapat diartikan sebagai kehadiran Jokowi sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia pada tahun 2023 yaitu menjadi pemimpin ASEAN dan menunjukkan kepiawaian Indonesia di kancah internasional.

Akan tetapi seperti yang disampaikan melalui akun YouTubenya, Jokowi menjawab pertanyaan publik mengenai status keanggotaan Indonesia di BRICS. Ia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang mengkaji dan mengkalkulasikan berbagai hal terkait dengan BRICS. BRICS sebagai organisasi internasional yang bertekad menguatkan peran negara berkembang dan memperbaiki tata kelola global dianggap bertentangan dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Rusia dan Cina yang merupakan anggota BRICS saat ini dianggap sebagai dua negara yang bertentangan dengan Amerika Serikat dan berpotensi mengganggu stabilitas Amerika Serikat. Langkah Indonesia yang terkesan ‘menunda’ berkaitan dengan kepentingan nasional. Indonesia dengan prinsip politik bebas aktif dan tak berpihak, tidak menolak mentah-mentah dan menjaga hubungan dengan BRICS untuk menjaga harmonisasi hubungan Indonesia dengan negara anggotanya. Di sisi lain, keputusan

Indonesia untuk mempertimbangkan juga tidak menjadikan Indonesia sebagai pihak yang berlawanan dengan negara maju sebagaimana negara maju memandang BRICS.

KESIMPULAN

Kebijakan luar negeri Indonesia didasari oleh berbagai landasan yang diselaraskan untuk mencapai kepentingan nasional dan dilakukan dengan berbagai aktor internasional termaksud organisasi internasional seperti BRICS. Indonesia telah beberapa kali menjalin interaksi dengan BRICS sebagai organisasi yang bertujuan meningkatkan peran negara berkembang di dunia internasional. Mengacu pada penelitian ini, dapat dilihat kebijakan luar negeri terhadap eksistensi BRICS pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009 – 2013) dan masa pemerintahan Joko Widodo (2014 – 2023). Berdasarkan perspektif strategis kebijakan luar negeri yang disampaikan oleh Lovell bahwa kebijakan luar negeri dilakukan untuk meraih kepentingan nasional sebuah negara, interaksi atau berbagai hal berkaitan dengan BRICS yang dilakukan oleh Indonesia juga didasari oleh kepentingan nasional negara. Kebijakan luar negeri Indonesia sendiri didasari oleh prinsip politik serta rencana pembangunan yang disusun oleh presiden sehingga presiden memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa kebijakan yang terjadi pada masa pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi memiliki perbedaan menyesuaikan kepentingan nasional yang ingin dicapai pada masa tersebut.

Dalam jangka waktu empat belas tahun (2009 – 2023), dapat terlihat perbedaan sikap yang diambil Indonesia terhadap BRICS yang dapat diidentifikasi berdasarkan kepala negara serta periodenya. Pada masa pemerintahan SBY interaksi yang dilakukan Indonesia dengan BRICS sesuai dengan RPJMN 2010 – 2014 yaitu mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan internasional dan dihormati di dunia internasional. Berlandaskan RPJMN tersebut, Indonesia pada masa kepemimpinan SBY terlihat banyak mengambil peran dalam berbagai isu dan fenomena internasional termasuk dengan terbentuknya BRICS. BRICS yang saat itu memiliki nama BRIC menjadi organisasi internasional dengan tujuan yang cukup menggemparkan dunia yaitu menggantikan dominasi negara maju. Sebagai negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan peran besar dalam internasional, Indonesia digadang-gadang akan segera bergabung dengan BRIC. Menyambut hal ini, SBY dan perangkat pemerintahannya secara optimis mengatakan Indonesia memiliki kekuatan ekonomi setara dengan negara anggota BRIC dan peran besar di antara negara berkembang sehingga tengah mempertimbangkan untuk bergabung menjadi anggota BRIC.

Pada periode pertama masa pemerintahan Jokowi (2014 – 2019), terlihat penurunan interaksi Indonesia dengan BRICS. Hal ini sejalan dengan RPJMN tahun tersebut yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing internasional yang menjadikan berbagai kebijakan luar negeri Indonesia bertujuan untuk kerja sama ekonomi domestik. Berbeda pada periode pertama, kebijakan luar negeri terhadap BRICS pada periode kedua Jokowi (2020 – 2023) mengalami peningkatan bahkan lebih dari periode presiden sebelumnya. Interaksi Indonesia dan BRICS mulai banyak terjadi pada tahun 2022 ketika tuan rumah konferensi tahunan BRICS saat itu adalah Cina. Cina banyak mengundang Indonesia dalam berbagai forum baik pada tingkatan kementerian luar negeri maupun tingkatan presiden. Indonesia sendiri telah banyak menjalin kerja sama bilateral dengan Cina membuat Indonesia menghadiri forum-forum ini sebagai salah satu upaya menjaga kedekatan antara Indonesia dan BRICS. Interaksi ini semakin meningkat pada tahun 2023 ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN di mana untuk pertama kalinya Indonesia diwakili Presiden Jokowi menghadiri pertemuan tahunan BRICS di Afrika Selatan. Sebagaimana disampaikan Jokowi bahwa Indonesia hadir mewakili negara ASEAN membuktikan upaya Indonesia dalam menjadi macan ASEAN dan menunjukkan potensi negara ASEAN sebagai negara berkembang dalam forum internasional BRICS.

Secara keseluruhan, dapat terlihat bagaimana kepentingan nasional Indonesia setiap tahunnya memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia khususnya dalam penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan terkait eksistensi organisasi internasional BRICS. Situasi internasional dan kepentingan nasional yang dinamis membuat kebijakan luar negeri kerap mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Peran kepala negara atau presiden juga penting mengingat arah kepentingan nasional dirumuskan oleh presiden sehingga kebijakan luar negeri Indonesia dapat berubah menyesuaikan karakteristik presiden pada waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyanti, Y. (2005). Penggunaan Literatur dalam Penelitian Kualitatif . *Jurnal Keperawatan Indonesia*, *9*(1), 32–35.

Agung, I. A. A. G. (2019). *Twenty years Indonesian foreign policy 1945–1965* (1 ed., Vol. 1). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

Agustin, D., & Dikarma, K. (2023, Agustus 21). *BRICS, Jokowi, dan Pergeseran Geopolitik Global*. Republika. https://www.republika.id/posts/44506/brics-jokowi-dan-pergeseran-geopolitik-global

Andrea, F. (2006). Indonesia dan Komunitas ASEAN. *Indonesian Journal of International Law*, *3*(3). https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.3.4

Anwar, D. F. (2001). Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Dinamika Global dan Internal. *Jurnal Ilmiah Bestari*, *14*(32).

Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, *42*(2), 139–160. https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7

BPMI Setpres. (2022, Juni 24). *Tiga Langkah Usulan Presiden Jokowi pada High-level Dialogue on Global Development*. Presiden RI. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/tiga-langkah-usulan-presiden-jokowi-pada-high-level-dialogue-on-global-development/

BPMI Setpres. (2023a, Agustus 24). *Di Afrika Selatan, Presiden Jokowi Hadiri KTT BRICS*. Presiden RI. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/di-afrika-selatan-presiden-jokowi-hadiri-ktt-brics/

BPMI Setpres. (2023b, Agustus 24). *Presiden Jokowi Ajak Negara Berkembang Bersatu di KTT BRICS, Indonesia Pertimbangkan Keanggotaan*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5120/berita/presiden-jokowi-ajak-negara-berkembang-bersatu-di-ktt-brics-indonesia-pertimbangkan-keanggotaan

Chatterjee, M., & Naka, I. (2022). Twenty years of BRICS: political and economic transformations through the lens of land. *Oxford Development Studies*, *50*(1), 2–13. https://doi.org/10.1080/13600818.2022.2033191

China Daily. (2009, Juni 16). *Indonesia may soon be another "i" in BRIC: Report*. China Daily. https://global.chinadaily.com.cn/cndy/2009-06/16/content_8287054.htm

CNN Indonesia. (2023, Mei 4). *Kemendag Respons Kabar RI Bakal Gabung BRICS*. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230504184713-92-945402/kemendag-respons-kabar-ri-bakal-gabung-brics.

Darnal, A. (2023, November 9). *The Future of BRICS: Between Objectives and Challenges Global South Experts Turn the Tables*. Stimson. https://www.stimson.org/2023/the-future-of-brics-between-objectives-and-challenges/

Fathun, L. M. (2022). Pemaknaan Pertahanan dan Keamanan Wilayah Pulau Natuna Perspektif Teori Mandala. *Jurnal Lemhannas RI*, *8*(2), 101–114. https://doi.org/10.55960/jlri.v8i2.316

Gee, J. P. (2014). *An Introduction to Discourse Analysis*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315819679

Gian, A., & Akim, A. (2020). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap World Trade Organization Dalam Negosiasi Pembentukan Aturan Subsidi Perikanan. *Padjadjaran Journal of International Relations*, *2*(1), 18. https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.22247

Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran . *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, *IV*(II).

Hudson, V. M. (2017). The History and Evolution of Foreign Policy Analysis. Dalam S. Smith, A. Hadfield, & T. Dunne (Ed.), *Foreign policy : theories, actors, cases* (2 ed., Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/hepl/9780198708902.001.0001

Ilmie, M. I. (2022, Mei 21). *China ajak negara lain bergabung dalam BRICS*. Antara. https://www.antaranews.com/berita/2893321/china-ajak-negara-lain-bergabung-dalam-brics

Indrayana, R. Z. (2024). Reviewing the Foreign Policy of the Republic of Indonesia Through President Jokowi's Visit to South Africa in 2023. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, *20*(1), 96–107. https://doi.org/10.26593/jihi.v20i1.7626.96-107

Jackson, R., & Sørensen, G. (2013). *Introduction to International Relations Theories and Approaches* (5th ed.). Oxford University Press.

Jacquier, B. (2011, September 28). *BRIC or BRIIC?* Global EDGE. https://globaledge.msu.edu/blog/post/1121/bric-or-briic

Jose, H. S., & Prasetyo, S. A. (2021). A STRATEGIC VIEW OF MINILATERALISM: INDONESIA, QUAD, ASEAN, SOUTH KOREA, JAPAN, AND IMPEDIMENT TO ASEAN CENTRALITY? *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, *4*(2), 1–21. https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.268

Kamalakaran, A. (2013, November 18). *Hubungan Rusia-Indonesia Semakin Menguat*. Russia Beyond the Headlines. https://id.rbth.com/politics/2013/11/18/hubungan_rusia-indonesia_semakin_menguat_22787

Kamalina, A. R. (2023, Juli 12). *Luhut: Jokowi Bakal Datang ke KTT BRICS di Afrika*. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20230712/9/1674156/luhut-jokowi-bakal-datang-ke-ktt-brics-di-afrika

Kementerian Sekretariat Negara RI. (2010, Desember 14). *Kuliah Umum Presiden RI pada Dies Natalis ITS Surabaya, 14 Desember 2010*. https://www.setneg.go.id/baca/index/kuliah_umum_presiden_ri_pada_dies_natalis_its_surabaya_14_desember_2010

Khalida, M. S. (2023, Agustus 31). *Retno: Menlu anggota BRICS dekati Indonesia ajak bergabung*. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/3705018/retno-menlu-anggota-brics-dekati-indonesia-ajak-bergabung

Llewellyn, A. (2023, Agustus 28). *Indonesia's absence from bigger BRICS echoes decades of non-aligned policy*. Aljazeera. https://www.aljazeera.com/economy/2023/8/28/indonesias-absence-from-bigger-brics-echoesdecades of-non-alignedpolicy

Lovell, J. P. (1970). *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. Holt, Rinehart and Winston.

Mila, N., Vida, F., & Adi, D. P. (2020). Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, *1*(2), 73. https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40866

Millar, T. B. (1969). On Writing About Foreign Policy. Dalam J. N. Rosenau (Ed.), *International politics and foreign policy : a reader in research and theory* (hal. 57–64). The Free Press.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2023, Juni 3). *Minister of Foreign Affairs Invites BRICS to Fight for Every Country's Right to Development*. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/en/read/4813/view/minister-of-foreign-affairs-invites-brics-to-fight-for-every-countrys-right-to-development

Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China. (2022, Mei 20). *Wang Yi Chairs Dialogue of Foreign Ministers between BRICS and Emerging Markets and Developing Countries*. Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China. https://www.mfa.gov.cn/mfa_eng/wjbzhd/202205/t20220520_10690435.html

Nugraheny, D. E., & Setuningsih, N. (2023, Agustus 24). *Jokowi Tegaskan Indonesia Belum Gabung Jadi Anggota BRICS*. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2023/08/24/21174491/jokowi-tegaskan-indonesia-belum-gabung-jadi-anggota-brics?page=all

Oratmangun, D. (2012, Maret 19). *Aliansi Strategis Indonesia – ASEAN – Rusia*. Tabloid Diplomasi. https://www.tabloiddiplomasi.org/aliansi-strategis-indonesia-asean-rusia/

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (2010).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (2015).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (2005).

Pribadi, I. A. (2023, Agustus 7). *Jokowi akan putuskan soal kemungkinan Indonesia gabung BRICS*. Antara . https://www.antaranews.com/berita/3670053/jokowi-akan-putuskan-soal-kemungkinan-indonesia-gabung-brics

Putri, F. M., & Santoso, M. P. T. (2023). BRICS Diplomacy: Building Bridges for Global Cooperation. *Politics and Humanism*, *2*(1), 10–21. https://doi.org/10.31947/jph.v2i1.27197

Ramadhan, I. (2017). Lobi Israel dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah. *Intermestic: Journal of International Studies*, *1*(2), 144. https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.5

Ramdhani, D., & Demanik, C. (2018, Oktober 20). *Di Rusia, Ridwan Kamil Singgung "One Village One Company" dan "Happiness Program" untuk Jawa Barat*. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2018/10/20/07295121/di-rusia-ridwan-kamil-singgung-one-village-one-company-dan-happiness-program

Reuters. (2023, Agustus 22). *What is BRICS, which countries want to join and why?* Reuters. https://www.reuters.com/world/what-is-brics-who-are-its-members-2023-08-21/#:~:text=Over%2040%20countries%2C%20including%20Iran,2023%20summit%20chair%20South%20Africa.

Rianda, B., Yani, Y. M., & Sudirman, A. (2022). PENERAPAN CONCORDANCE STRATEGY DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA MENGHADAPI KEPENTINGAN NINE DASH LINE CHINA. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *4*(1), 51. https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38022

Riyanto, B., Djumala, D., & Tan, Y. (2023). Indonesia's Strategic Narrative on the New Dynamics of Great Power Rivalry in the Indo-Pacific. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, *11*(1), 143–166. https://doi.org/10.21512/jas.v11i1.9406

Schiffrin, D., Tannen, D., & Hamilton, H. E. (2001). *The Handbook of Discourse Analysis*. Blackwell Publishers.

Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin, Ed.). CV. Nata Karya.

Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, *11*(1). https://doi.org/10.26593/jihi.v11i1.1442.%p

Stuenkel, O. (2014). Emerging Powers and Status: The Case of the First BRICs Summit. *Asian Perspective*, *38*(1), 89–109. http://www.jstor.org/stable/42704855

Sukma, R. (1995). The Evolution of Indonesia's Foreign Policy: An Indonesian View. *Asian Survey*, *35*(3), 304–315. https://doi.org/10.2307/2645547

Tenggara Strategics. (2023, September 4). *Analysis: Indonesia joining BRICS? Thanks, but no thanks*. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/09/04/analysis-indonesia-joining-brics-thanks-but-no-thanks.html.

The Economic Times. (2009, Juni 16). *"BRIC should include Indonesia."* The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/bric-should-include-indonesia/articleshow/4660222.cms?from=mdr

The Jakarta Post. (2010, Oktober 28). *Mandiri to present case for BRICI*. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2010/10/28/mandiri-present-case-brici.html

Wibowo, E. A., Dewi, E., & Syavira, F. (2011, Januari 3). *Yudhoyono Yakin Indonesia Masuk Perkumpulan BRIC*. Tempo.co. https://bisnis.tempo.co/read/303337/yudhoyono-yakin-indonesia-masuk-perkumpulan-bric

BIOGRAFI

Marshadea Aisyah mahasiswa Angkatan 2021 di Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran. Marshadea memiliki ketertarikan (*area of interest*) pada kebijakan luar negeri dan organisasi internasional.

Siti Aliyuna Pratisti merupakan dosen di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran